

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberitaan tentang pemilu presiden 2014 di dunia pertelevisian belum lama berselang. Di ujung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bergegas menyelesaikan Undang-Undang pemilihan kepala daerah (pilkada). Berita polemik politik yang bergulir di hadapan kita beberapa waktu terakhir ini yaitu rencana penghapusan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung oleh koalisi oligarki merah putih. Rencana penghapusan pilkada langsung masih belum tuntas, proses di DPR masih berlangsung. Selama satu dekade ini pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat namun saat ini pemerintah ingin mengubah pemilihan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sejak tahun 2012 pemerintahan SBY melalui Kementerian Dalam Negeri sudah mengajukan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang menghendaki bupati dan walikota dipilih melalui pemilihan langsung sedangkan gubernur dipilih oleh anggota DPRD provinsi. Alasan yang menopang usulan ini agar biayanya bisa lebih murah dibanding pemilihan langsung dan mencegah praktek politik uang. Sebelum berakhirnya pilpres 2014, hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang setuju dengan usul pemerintah tersebut, kini, setelah pilpres politik telah berubah hanya fraksi dari partai pendukung koalisi Jokowi yaitu Fraksi PDIP, NasDem, Hanura, PKB, dan PKPI yang memilih mempertahankan pilkada secara langsung.

Dalam rentang 2012 hingga Agustus 2014, rata-rata pemberitaan mengenai pilkada tidak lebih dari 250 eksposur per bulannya. Pemberitaan ini menjadi mencuat secara spektakuler dengan capaian angka 8490 ekspos. Hal ini tidak lain dikarenakan *move* politik Koalisi Merah Putih di parlemen yang mendorong penghapusan pilkada langsung dalam RUU Pilkada. Tak pelak, dalam sebulan terakhir pemberitaan ini menjadi perhatian media nasional maupun lokal hampir seluruh wilayah Indonesia (Pramudya, W. 2014. *KMP Melawan Kehendak Rakyat*. Diakses dari Indoprogress.com tanggal 30 September 2014 Jam 10.56 WIB).

Pro dan kontra tak bisa dihindari. Popularitas politik pun membelah diri: yang mendukung RUU Pilkada *vis a vis* yang menolak RUU pilkada. Dari pemetaan konten media online, argumen yang mendasari masing-masing kubu dapat dikategorikan argumen empiris, politis dan normatif. Dalih empiris yang digunakan oleh Koalisi Merah Putih untuk menghapuskan pilkada langsung pada tingkat tertentu tidak bisa lagi disangkal bahwa dengan pilkada langsung lebih banyak memunculkan *mudharat* (kerugian) dari pada manfaat, seperti boros anggaran politik uang, korupsi, hingga terjadinya amuk massa. Akan tetapi, bagi kalangan yang menolak RUU Pilkada, dalih mereka dianggap mengabaikan semangat zaman, kurang proporsional sebab tidak ada data, misalnya, yang menunjukkan korelasi positif dan linier antara maraknya korupsi dengan pilkada langsung. Maraknya politik uang, secara politis, muncul bukan karena pilkada langsung, melainkan karena masih adanya oligarki dan kartel politik yang merupakan praktik politik yang sudah hidup jauh waktu sebelum pilkada langsung diimplementasikan.

Tampilan berita yang berkaitan dengan pilkada tidak langsung ini dijadikan topik utama pada pemberitaan di media cetak maupun media elektronik.

Media cetak seperti, surat kabar, tabloid dan majalah. Sedangkan media elektronik seperti, radio, televisi dan media *online*.

Dalam surat kabar harian Kompas edisi Jum'at, 3 Oktober 2014 dengan judul "*Pilkada Langsung*" wartawan menuliskan Pengesahan Rencana Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah, Jumat (26/9) dini hari, masih menyisakan persoalan. Rakyat marah karena merasa hak demokrasinya disabot parlemen. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun kecewa. Kekecewaan Presiden SBY mengherankan karena sesuai Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, setiap RUU dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. Dalam jumpa pers, Presiden menyatakan sependapat dengan pandangan, pilkada langsung merupakan buah demokrasi. Sebagai presiden yang terpilih langsung dalam dua periode, wajar jika ia juga mendukung pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan mendasar. Presiden menyampaikan optimismenya, kubu pendukung pilkada lewat DPRD dapat memahami gagasan pilkada langsung dengan perbaikan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan (PERPPU)

Berangkat dari fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pemberitaan pilkada (pemilihan kepala daerah) tidak langsung yang dilakukan oleh kedua media televisi Metro TV dan TV One. Hal ini karena peristiwa pilkada tidak langsung merupakan peristiwa penting yang sedang hangat dibicarakan oleh publik. Perbedaan pandangan antara Koalisi Merah Putih (KMP) yang didukung oleh Gerindra, Golkar, PKS, PAN, serta PPP dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari PDIP, NasDem, Hanura, PKB, dan PKPI. Sepanjang bulan September 2014, pemberitaan di dua TV berita yang bersiaran

secara nasional, Metro TV dan TV One, menyoroti isu ini dengan sudut pandang berbeda.

Contohnya dapat diamati pada media TV One dan Metro TV, keduanya mempunyai perbedaan dalam menyajikan berita tentang pilkada tidak langsung. Perbedaan pemberitaan pada media televisi di atas tentang pilkada tidak langsung juga menarik untuk disimak. Hal tersebut terkait dengan para pemilik kedua media tersebut yaitu Aburizal Bakrie yang mendukung adanya pilkada tidak langsung dan Surya Paloh yang menolak pilkada tidak langsung.

Pada hari Jum'at, 12 September 2014 pukul 18:00 WIB, pemberitaan dalam program *Metro Highlight*, di Metro TV biasanya mengawali berita dengan memutar tayangan tentang kerusuhan aksi penolakan pilkada tak langsung dan cuplikan wawancara dari elite partai Koalisi Indonesia Hebat. Dalam naskahnya, Metro TV menampilkan tokoh-tokoh dan sejumlah LSM yang menekan aksi penolakan terhadap adanya pilkada tidak langsung karena melanggar konstitusi, rakyat tidak lagi memberikan mandat kepada kepala daerah. Mereka juga menilai UU MD3 dan RUU Pilkada yang kini sedang dibahas di DPR dan Kemendagri merupakan langkah KMP untuk mempersulit pergerakan Jokowi dan Jusuf Kalla dalam kepemimpinannya nanti. Metro TV juga secara terus menerus menayangkan pernyataan presiden terpilih Joko Widodo yang menilai pemilihan kepala daerah tidak perlu dilakukan secara langsung adalah kemunduran demokrasi menurutnya jika ada kekurangan sebaiknya dibenahi bukan dihilangkan. Metro TV lebih menonjolkan berita tentang kelemahan dari pilkada tak langsung diantaranya adalah menghilangkan hak politik rakyat.

Angle yang berbeda diterapkan oleh TV One dalam program Apa Kabar Indonesia Petang pada Kamis, 11 September 2014 pukul 19.00 WIB menyiarkan debat yang berjudul ‘Demokrasi Liberal vs Pancasila debat antara Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra). Dalam tayangan tersebut dipaparkan pendapat dari Syahrul Yasin Limpo seorang ketua umum APPSI, tentang pendekatan substansi yang perlu dikritisi. Dalam tayangan tersebut Syahrul menuturkan:

“ Politik langsung itu menghadirkan pencitraan dan pencitraan itu menjadi beban biaya yang cukup mahal. Itu tidak bisa dinisbikan itu pasti ada”.

Sejumlah pengamat, seperti politikus Partai Gerindra Fadli Zon, Cholil Nafis, Sekrertaris Komisi Pengkajian Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Heri Budianto, pengamat komunikasi politik yang dijadikan narasumber dalam tayangan berita itu menambahkan anggapan yang sama, bahwa pilkada langsung lebih banyak *mudharat* contohnya yang berkenaan dengan *money politic*. Mereka menilai, demokrasi hanya untuk orang-orang yang punya uang mereka harus membeli partai politik untuk dijadikan kendaraan. Sesuai konsep demokrasi sila ke-4 demokrasi Pancasila menjadi hal yang sangat penting bukan demokrasi liberal.



Gambar 1.1 Fadli Zon sebagai pembicara dalam tayangan ”Apa Kabar Indonesia Malam”



Gambar 1.2 Presiden Jokowi saat diwawancara oleh wartawan

Isi pemberitaan pilkada tidak langsung pada kedua media tersebut tidak sama karena mempunyai kepentingan dari kepemilikan yang berbeda. TV One adalah media yang pemiliknya merupakan Ketua Umum Partai Golkar dari anggota Koalisi Merah Putih tentu akan menonjolkan berita tentang pilkada tidak langsung dan lebih cenderung mengarah pada mengkritik sistem pemilihan langsung yang lebih banyak kelemahannya, sedangkan Metro TV lebih banyak menampilkan berita tentang aksi tolak pilkada tak langsung karena pemilik dari media tersebut merupakan pendukung dari Koalisi Jokowi-JK yang mendukung pilkada langsung. Melalui berita yang dikeluarkannya, media dapat dengan mudah melakukan propaganda. Isu-isu politik, sosial, dan ekonomi dapat dengan mudah dipublikasikan dengan gaya bahasa dan ideologi masing-masing. Kepentingan

politik dan kepemilikan media yang telah mempengaruhi pembingkai berita tersebut. Media bukanlah sekedar saluran yang bebas, tetapi juga konstruksi yang mengonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan pemihaknya. Media dipandang sebagai konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya (Eriyanto, 2001:36).

Masing- masing institusi media tentunya memiliki ideologi serta visi dan misi tersendiri. Ideologi tersebut akan mempengaruhi kebijakan redaksional media. Seorang wartawan yang bekerja di suatu media dengan kebijakan redaksional tertentu, tentunya akan mencari, meliput, menulis dan melaporkan peristiwa atau realitas berdasarkan kebijakan redaksional media. Kebijakan redaksional tersebut akan membatasi kebebasan wartawan tersebut dalam memahami dan mempersepsikan sebuah realitas. Intinya, bahwa seorang wartawan, bagaimana cara dia menuliskan sebuah berita, akan mencerminkan ideologi institusi media dimana dia bernaung. Sikap atau tendensi sang wartawan dalam meliput atau melaporkan sebuah berita akan sekaligus menunjukkan sikap dan tendensi medianya.

Media bukanlah saluran yang bebas, media tidak semuanya sama persis seperti apa yang digambarkan, memberitakan apa adanya, cerminan dari realitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Media yang kita lihat, justru mengkonstruksi sedemikian rupa terhadap realitas yang ada. Ini semua terkait dengan bagaimana cara pandang media untuk membingkai atau menkonstruksi suatu realitas tertentu.

Dalam merekonstruksi berita, masing-masing media menseleksi isu-isu tertentu dan menekan atau menonjolkan aspek-aspek tertentu dari realitas. Dari cara media menseleksi isu dan aspek-aspek tertentu berita, akan terlihat bagaimana tendensi atau kecenderungan media tersebut terhadap berita yang mereka buat.

Berita yang dilihat di televisi bukanlah cerminan dari peristiwa atau realitas itu sendiri, melainkan sebuah hasil rekonstruksi dari realitas, dan yang menjadi agen rekonstruksi berita adalah wartawan. Dengan kata lain, berita yang kita konsumsi adalah hasil rekonstruksi atas berita menurut perspektif wartawan (Eriyanto, 2002:255).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka perumusan masalah yang dapat ditulis, bagaimanakah Metro TV dan TV One mbingkai pemberitaan pilkada tidak langsung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Metro TV dan TV One mbingkai pemberitaan tentang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Tidak Langsung.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian karya-karya ilmiah, khususnya dalam memberikan sumbangan terhadap perkembangan studi Ilmu Komunikasi mengenai analisis *framing*.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran khalayak agar lebih mampu mengetahui bagaimana sebuah peristiwa itu dikonstruksikan oleh media elektronik dan kemudian dijadikan berita.

E. Kerangka Teori

a. Konstruksi Realitas Politik Pemberitaan

Berita muncul dalam benak manusia. Berita yang muncul dalam benak manusia itu bukan suatu peristiwa, ia adalah sesuatu yang dicerap setelah peristiwa. Ia tidak identik dengan peristiwa tersebut. Inti yang disesuaikan dengan kerangka acuan yang dipertimbangkan agar peristiwa itu memiliki arti pembaca. Berita adalah sebuah aspek komunikasi dan memiliki karakteristik-karakteristik yang lazim dari proses itu (Sobur, 2009).

Menurut John Fiske, makna tidak intrinsik ada dalam teks itu sendiri. Seseorang yang membaca suatu teks berita tidak menemukan makna dalam teks, sebab yang ditemukan dan hadapi secara langsung adalah pesan dalam teks. Makna itu diproduksi lewat proses yang aktif dan dinamis baik dari sisi pembuat maupun khalayak pembaca. Pembaca dan teks sama-sama mempunyai andil dalam memproduksi pemaknaan, dan hubungan itu menempatkan seseorang sebagai satu bagian dari hubungannya dengan sistem tata nilai yang lebih besar di mana dia hidup dalam masyarakat (Eriyanto, 2002:87).

Dalam proses makna tersebut, media mengambil peran sebagai agen konstruksi. Pandangan konstruktivis melihat media di bawah struktur dominasi ideologi yang mewujud dalam pemberitaannya. Secara implisit, hasil berita tidak lah berbeda dari jenis berita yang lainnya; mengedepankan objektivitas, aturan-aturan penelitian, dan profesionalitas jurnalistik. Namun, penelitian berita tersebut juga mengungkapkan agenda institusi media (Tuchman dalam Eriyanto, 2002). Media tidak pernah lepas dari bias kepentingan penguasa yang mengontrol perilaku media. Sebuah produk berita adalah hasil dari perjalanan panjang konstruksi yang dilakukan oleh orang-orang di dalam institusi media.

Peristiwa politik selalu menarik perhatian media massa sebagai bahan liputan. Hal ini terjadi karena dua faktor yang saling berkaitan. Pertama, dewasa ini politik berada di era mediasi (*politics in the age of mediation*), yakni media massa, sehingga hampir mustahil kehidupan politik dipisahkan dari media massa, malahan aktor politik senantiasa berusaha menarik perhatian wartawan agar aktivitas politiknya memperoleh liputan dari media. Kedua, peristiwa politik dalam bentuk tingkah laku dan pernyataan dalam aktor lazimnya selalu mempunyai nilai berita sekalipun peristiwa politik itu bersifat rutin belaka, seumpamanya rapat partai atau pertemuan seorang tokoh politik dengan para pendukungnya. Apalagi jika peristiwa politik itu bersifat luar biasa seperti pergantian presiden di tengah masa jabatan dan pembubaran parlemen. Alhasil, liputan politik senantiasa menghiasi berbagai media setiap harinya (Hamad, 2004:22).

Liputan politik juga cenderung lebih rumit ketimbang reportase bidang kehidupan lainnya. Pada satu pihak, liputan politik memiliki dimensi pembentukan pendapat umum (*public opinion*), baik yang diharapkan oleh para politisi maupun oleh para wartawan. Karenanya, berita politik bisa lebih dari sekedar reportase peristiwa politik, tetapi merupakan hasil konstruksi realitas politik, untuk kepentingan opini publik tertentu. Dalam komunikasi politik, aspek pembentukan opini inilah yang justru menjadi tujuan utama, karena hal ini akan mempengaruhi pencapaian-pencapaian politik para aktor politik (Hamad, 2004:22).

Dalam sistem libertarian, hasil konstruksi realitas akan berbeda antara satu media dengan media lainnya, tergantung dari dinamika eksternal dan internal masing-masing, serta strategi pengkonstruksian yang dipilih. Melalui kerangka teoritis (*theoretical framework*) ini pula dengan mudah kita dapat melihat kompleksitas liputan politik tersebut. Liputan politik memiliki banyak sisi yang terkait satu sama lain: ada kesadaran memilih bahasa dan simbol politik, ada kiat tertentu dalam memilih fakta dan pengemasan pesan, dan ada kesediaan memberi pesan, ada kesediaan memberi ruang atau agenda untuk merilisnya.

Di samping itu juga liputan politik juga mesti memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal masing-masing media, entah itu faktor idealisme, kepentingan ekonomi politik, maupun ideologis. Dengan kerangka teoritis ini, kita juga bahkan bisa menimbang sikap (motivasi) masing-masing media dalam melaporkan peristiwa-peristiwa politik (Hamad, 2004:26).

b. Ideologi Jurnalistik dan Konstruksi Berita

Jurnalis pada dasarnya dikontrol. Kontrol paling besar adalah bagaimana menyajikan berita kepada khalayak. Berita berasal dari peristiwa yang bisa dibentuk menjadi berita melibatkan ideologi profesional jurnalis. Ideologi profesional itu menentukan mana yang bisa, tidak bisa, bagian mana, dan dengan cara apa peristiwa tersebut diberitakan. Ideologi di balik jurnalisme profesional tidak lain sebagai bentuk penghambaan terhadap pemilik modal dalam suatu sistem media. Isi bukan ditunjukkan bagi kepentingan pembaca atau pemirsa, tetapi justru lebih diupayakan kepuasan pemilik media yang juga berkecimpung dalam elit politik. Dalam pandangan Stuart Hall (1998), pada proses produksi berita terdapat tiga ideologi profesional jurnalis sebagai berikut.

Pertama, nilai berita. Tiap hari terdapat ribuan peristiwa di seluruh dunia. Tetapi tidak semua peristiwa dapat disebut berita, karena dalam ideologi profesional jurnalis, sebuah peristiwa itu bisa diangkat sebagai berita tergantung kepada nilai berita yang dikandungnya. Peristiwa seseorang terkena *stroke* bukanlah berita tetapi kalau yang terkena *stroke* adalah seorang selebritas maka peristiwa itu disebut berita. Pembunuhan bukan berita, tetapi kalau pembunuhan disertai dengan pemotongan mayat korban (mutilasi) baru disebut berita. Ideologi ini secara tidak langsung mengkonstruksi peristiwa, hanya peristiwa tertentu saja yang layak disebut berita. Peristiwa itu umumnya mengandung konflik, menimbulkan kekuatan, keharuan, *human interest*, humor, dramatis, atau melibatkan orang-orang terkenal. Ideologi ini menentukan dan mengontrol kerja jurnalis. Jurnalis di Lapangan akan memilah peristiwa yang diberitakan. Redaktur

di kantor akan memilah berita bernilai tinggi untuk ditempatkan di halaman pertama. Bagian desain akan membuat ilustrasi untuk peristiwa bernilai tinggi dan seterusnya.

Kedua, kategori berita. Pada tingkat ini jurnalis mempunyai pandangan profesional yang dikenal sebagai kategori berita. Peristiwa tertentu yang dikategorikan sebagai berita hangat (*hard news*) harus disajikan sesegera mungkin. Peristiwa lain yang tidak membutuhkan kecepatan dalam pelaporan dikategorikan sebagai *feature*. Ada peristiwa yang hanya membutuhkan data dan informasi umum (padat dan ringkas), tetapi ada juga peristiwa yang harus ditulis dengan panjang lebar, disertai argumentasi dan data penunjang. Ada lagi peristiwa yang harus ditulis dengan kedekatan emosional agar tercipta situasi keharuan karena kategori berita menentukan bagaimana peristiwa diperlakukan. Peristiwa dapat diperlakukan secara berbeda oleh jurnalis, yaitu diklasifikasikan menurut standar dan ukuran tertentu. Kategori berita, seperti dikatakan Tuchman, juga menentukan pola kerja jurnalis. Ada peristiwa yang membutuhkan intimitas dan personalitas jurnalis. Kategori berita adalah ideologi yang mengatur dan mengontrol bagaimana jurnalis bertindak dalam situasi atau peristiwa tertentu.

Ketiga, objektivitas. Ideologi ini berhubungan dengan prosedur dan standar kerja jurnalis. Produksi berita pada dasarnya adalah proses mengolah peristiwa menjadi informasi yang disebarkan kepada khalayak. Khalayak harus diyakinkan, apa yang disajikan oleh jurnalis adalah kebenaran. Sama seperti dokter dengan pasien, mulai dari pemeriksaan hingga pemberian obat ada prosedurnya. Hal itu menjamin kepercayaan bahwa dokter memberikan obat yang

benar. Dalam pemberitaan, yang dapat menjamin laporan jurnalis tersebut benar-benar nyata (terjadi) adalah objektivitas (ideologi profesional) yang dibentuk dari ketaatan atas sejumlah prosedur kerja profesional. Prosedur tersebut, antara lain fakta harus dicek ulang, laporan harus berimbang dan meliputi dua sisi (*cover both side*). Tentu saja sulit sekali diharapkan sebuah berita dapat sama persis dengan realitas atau peristiwa. Justru karena hal tersebut sulit terwujud, dibutuhkan prosedur standar yang diakui bersama untuk mendekati realitas yang sebenarnya. Tuchman menyebut objektivitas ini sebagai ritual bagi proses pembentukan berita (Ishadi, 2014:18).

Premis bahwa jurnalis dikontrol dalam peliputan, penulisan dan penyajian berita dikuatkan oleh pendapat Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese. Dalam pandangan Shoemaker ideologi bukanlah sistem kepercayaan individu seperti yang selama ini dipahami khalayak. Menurutnya ideologi adalah representasi fenomena sosial. Sebuah sistem yang berkaitan secara keseluruhan antara satu individu dengan individu lain dalam masyarakat. (Shoemaker dan Reese, 1996: 213). Maka keputusan dari salah satu individu akan mempengaruhi keputusan individu lain. Ideologi bersifat organik dalam masyarakat, menjadikan setiap individu saling terkait. Lebih lanjut Shoemaker membicarakan ideologi jurnalistik sebagai berikut:

At the Ideological level we look more closely at the powerful in society, and expressly how that power is played out through the media.---Ideas have links to interests and power and that the power to create symbols is not a neutral force. Not only is news about the powerful, but it structures stories so that events are interpreted from the perspective of powerful interests. (1996: 215)

Dalam tataran ideologis kita melihat lebih dekat pada yang kuat dalam masyarakat, dan kekuasaan dimainkan melalui media.---Ide-ide memiliki hubungan dengan kepentingan dan kekuasaan dan kuasa untuk menciptakan simbol bukanlah kekuatan yang netral. Tidak hanya berita adalah tentang "sang kuasa", tapi struktur cerita-cerita yang menjadikan sebuah kejadian diinterpretasikan dari perspektif kepentingan kuasa.

Ideologi jurnalistik menjadi sebuah instrumen untuk membingkai peristiwa sesuai perspektif yang diinginkan kuasa. Perspektif ini disampaikan melalui simbol-simbol yang diselipkan dalam pembuatan berita. Sama seperti yang dijabarkan Stuart Hall, Shoemaker menyebut kuasa sebagai sosok pemilik media yang biasanya juga berkecimpung dalam ranah politik (Shoemaker dan Reese, 1996: 221). Sebagai sebuah sistem organik ideologi sering dianggap sebagai sistem bebas yang menjadikan setiap individu bebas menentukan cara berpikir dan tindakan, imajinasi ini juga sering dipahami dalam kacamata jurnalistik dan pemberitaan. Namun tentu saja tidak demikian. Meskipun pers atau jurnalisme disebut 'bebas' sebenarnya isi dari produk jurnalisme itu merepresentasikan ideologi yang dimiliki oleh sang *paymaster* atau pemilik modal (Shoemaker dan Reese, 1996: 222). Kondisi ini tentu cukup membingungkan. Bagaimana bisa begitu banyak individu dalam sistem sosial (masyarakat) menurut pada agenda atau perspektif yang *disetting* oleh kuasa (pemilik media) melalui berita atau produk jurnalistik yang dibuatnya. Shoemaker menyebut kondisi ini sebagai *hegemonic values in news* (Shoemaker dan Reese, 1996: 228).

Shoemaker mengadaptasi hegemoni Antonio Gramsci untuk menjelaskan kondisi saat masyarakat terbuai dalam imajinasi adanya kebebasan, namun sesungguhnya mereka tidak sadar jika dikuasai oleh sang kuasa. Inilah kenapa tidak banyak masyarakat yang protes saat ada kondisi pers yang dikendalikan oleh

pemilik modal. Hegemoni menjadikan mereka tidak sadar bahwa mereka tengah dikuasai, akhirnya sang pemilik modal media berhasil menyampaikan perspektif keinginannya dan tercapailah konsensus atau kesepakatan di tengah masyarakat.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Berita

Berita menurut Dean M. Lyle Spencer, adalah suatu pernyataan atau ide yang dapat menarik perhatian sebgaiian besar pembaca (Assegaff, 1991:24). Dalam konteks penelitian ini, berita merupakan hasil dari proses konstruksi yang terjadi di dalam sebuah institusi bernama media. Terdapat berbagai kepentingan dan pengaruh yang dapat mengintervensi isi media saat proses pembentukan berita berlangsung. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese mengidentifikasi dan meringkas lima faktor yang mempengaruhi kebijakan isi media. Kelima faktor tersebut adalah individual, rutinitas media, organisasi, ekstra media, dan ideologi.

Faktor individual merujuk pada tugas seorang wartawan yang terjun ke lapangan untuk mengumpulkan berita setiap harinya. Menurut Shoemaker dan Reese, ada berbagai faktor individu yang mungkin mempengaruhi isi media di antaranya latar belakang personal (tanah kelahiran, jenis kelamin, usia, agama, pendidikan formal maupun informal), pengalaman organisasi atau pekerjaan, nilai yang dianut, bahkan sampai kecenderungan orientasi politik tertentu. Termasuk juga dalam faktor ini adalah perilaku pemahaman terhadap nilai kepercayaan, serta orientasi profesional jurnalis tersebut. Terkait banyaknya latar belakang yang dibawa oleh masing-masing personal, wartawan maupun pengelola

media, maka hal ini sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap proses peliputan dan pengemasan berita. Dengan kata lain, wartawan punya kuasa untuk menentukan berita mana yang akan ditampilkan, mana yang lebih ditonjokan, maupun sebaliknya.

Faktor kedua adalah rutinitas media. Rutinitas media terkait dengan mekanisme seperti pengaturan siapa yang bertanggung jawab sejak berita itu akan diliputi hingga masuk ke proses cetak. Rutinitas juga terkait dengan prosedur standar yang telah berlangsung setiap hari di dalam media yang bersangkutan. Adanya prosedur standar mengartikan bahwa media punya ukuran sendiri tentang apa yang disebut berita, ciri-ciri berita yang baik, atau apa kriteria kelayakan berita.

Faktor ketiga adalah organisasi yang berhubungan dengan struktur organisasi pada media. Wartawan dan pengelola media bukanlah penguasa tunggal yang menentukan isi media secara keseluruhan, karena selain mereka juga ada bagian redaksi, pemasaran, iklan, sirkulasi, umum, dan seterusnya. Setiap bagian dari media ini punya kepentingan dan strategi untuk mencapai tujuannya masing-masing. Selain itu, mereka juga mempunyai filosofi keorganisasian sendiri. Perbedaan dalam hal-hal yang dianut antar divisi tertentu berpengaruh pada keputusan akhir terhadap berita yang akan disajikan.

Faktor keempat adalah ekstramedia atau faktor lingkungan di luar media yang menyangkut tiga faktor utama. Pertama, narasumber berita mempunyai kepentingan tertentu, yang lewat kampanye *public relations* dan *pressure group*

dapat memengaruhi proses konstruksi realitas di dalam media. Kedua, *revenue resources* atau sumber penghasilan media. Contohnya adalah sumber berita yang tidak bisa dipandang netral, sumber penghasilan media seperti iklan dan pelanggan atau pembeli media (khalayak). Ketiga, lembaga lain diluar media, seperti kalangan pemerintah, lingkungan bisnis, ekonomi, maupun teknologi. Hubungan mereka terhadap pengemasan berita berhubungan dengan pengaruh yang mereka salurkan secara langsung dan tidak langsung. Pihak pengiklan misalnya, yang berpengaruh pada penghasilan media, akan mempunyai strategi timbal balik yang menguntungkan, misalnya membuat media menghilangkan berita buruk mengenai mereka, atau sistem pemerintahan tertentu disebuah negara, misalnya otoritarian, tentunya akan berdampak pada apa yang boleh dan tidak boleh ditampilkan di sebuah media.

Faktor kelima sekaligus terakhir adalah ideologi. Ideologi atau kerangka berfikir tertentu, dimiliki oleh institusi media maupun orang-orang di dalamnya dan digunakan sebagai cara dalam melihat, menghadapi, dan menafsirkan realitas tertentu. Ideologi ini menyoroti pihak yang berkuasa di masyarakat, serta bagaimana kekuatan itu berperan dalam menentukan agenda media (Ishadi, 2014:16).

d. Strategi Pengemasan Berita (*Framing Strategies*)

Dalam komunikasi politik, konstruksi realitas oleh media menjadi sangat khas. Sebab cara sebuah media mengkonstruksikan suatu peristiwa politik akan

memberi citra tertentu mengenai sebuah realitas politik, yang bagi para aktor dan partai politik citra ini sangat penting demi kepentingan politiknya masing-masing

Seperti halnya teori semiotika yang biasa dipakai sebagai metode semiotika, teori *framing* juga bisa dipakai sebagai salah satu metode untuk memahami “*information strategy*” dalam sebuah wacana. Sebagai kebalikan dari strategi penyusunan realitas. Makna analisis framing berfungsi untuk “membongkar muatan wacana”.

Pembuatan *frame* di media didasarkan berbagai kepentingan internal, seperti ideologi, dan eksternal, misalnya teknis, ekonomis, politis. Pembuatan wacana tidak hanya mengindikasikan adanya kepentingan-kepentingan tersebut, tetapi juga mengarahkan hendak dibawa kemana isu yang diangkat dalam wacana tersebut (Hamad, 2004:22-23). Cara membentuk wacana di media adalah dengan mengemas realitas ke dalam sebuah struktur sehingga suatu isu menjadi bermakna. Fakta di dalamnya ada yang ditonjolkan, disembunyikan, atau dihilangkan sampai terbentuk suatu cerita yang mempunyai makna. Setiap kemasan wacana memiliki struktur internalnya sendiri dengan sebuah gagasan inti *frame* di dalamnya.

Sasaran dari analisis framing, sebagai salah satu metode analisis wacana, adalah menemukan aturan atau norma yang tersembunyi di balik sebuah teks. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui perspektif atau pendekatan yang dipergunakan oleh sebuah media dalam mengkonstruksikan sebuah peristiwa.

Analisis ini membantu kita melihat secara lebih mendalam bagaimana pesan diorganisir, digunakan, dan dipahami.

Eriyanto menyebutkan dua aspek utama dalam *framing* media massa. Pertama, memilih fakta atau realitas. Proses memilih fakta didasarkan pada asumsi bahwa wartawan tak mungkin melihat peristiwa tanpa perpektif. Dalam pemilihan fakta selalu terdapat dua kemungkinan, yaitu apa yang dipilih (*include*) dan apa yang dibuang (*excluded*). Peristiwa dilihat dari sudut pandang tertentu, sehingga mengakibatkan pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa berbeda antara satu media dengan media lainnya (Eriyanto, 2002:70). Kedua, menuliskan fakta. Dalam menuliskan fakta, dilihat bagaimana cara media menyajikan fakta tersebut kepada khalayak. Penyusunan fakta berkaitan dengan penonjolan informasi tertentu, pemilihan kata-kata yang digunakan, judul, urutan penulisan fakta, dan sebagainya. Intinya, penulisan fakta berkaitan dengan penekanan-penekanan yang dilakukan jurnalis dalam menampilkan sudut pandang tertentu (Eriyanto, 2002:70).

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis *framing*. Analisis *framing* adalah metode analisis teks yang tergolong dalam penelitian konstruksionis. Paradigma konstruksionis memiliki pandangan bahwa realitas sosial bukanlah sebuah realitas yang alami dan apa adanya, namun merupakan hasil dari konstruksi dari wartawan. Oleh karena itu, analisis *framing* bertujuan untuk menemukan cara bagaimana sebuah realitas dikonstruksi oleh media dan melalui cara yang

bagaimana konstruksi realitas tersebut dibentuk. Apabila diperhatikan, proses *framing* atas sebuah peristiwa realitas tergantung pada bagaimana kinerja wartawan dan kebijakan redaksional dalam mengkonstruksi sebuah realitas.

Dalam analisis *framing*, dikenal setidaknya empat model perangkat *framing*, yaitu perangkat framing model Murray Edelman, Robert N Entman, William A Gamson, dan terakhir perangkat framing model Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki. Masing-masing perangkat ini mempunyai elemen yang berbeda.

Menurut Gamson dan Modigliani, *framing* adalah suatu cara bercerita atau kumpulan dari gugusan ide yang telah terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna yang berasal dari peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana tertentu (Eriyanto, 2002:255).

Metode penelitian Gamson dan Modigliani ini memiliki delapan elemen yang terbagi dalam dua perangkat. Peristiwa tersebut dibingkai dan disajikan kepada khalayak (Eriyanto, 2002:223). Ada dua perangkat untuk menerjemahkan ide sentral dalam teks berita. Pertama, *framing device* (perangkat *framing*) yang berhubungan langsung dengan ide sentral atau bingkai yang akan ditekankan dalam teks berita. Perangkat *framing* ini ditandai dengan pemakaian kata, kalimat, grafik/gambar, dan metafora. Kedua, *reasoning devices* (perangkat penalaran) yang berhubungan dengan kohesi dan koherensi dari teks yang merujuk pada gagasan tertentu. Sebuah gagasan tidak hanya berisi kata atau kalimat, gagasan itu juga ditandai oleh dasar pembenar tertentu, alasan tertentu, dan sebagainya. Dasar

pembenar dan penalaran tersebut bukan hanya meneguhkan suatu gagasan, melainkan lebih jauh membuat gagasan tampak benar, sah, dan demikian adanya. Lewat aspek penalaran tersebut, khalayak akan menerima pesan itu sehingga tampak sebagai kebenaran, alamiah, dan wajar. Agar gagasan atau bingkai tersebut tampak meyakinkan, teks didukung dengan perangkat *framing (framing device)*—ditandai dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, metafora, atau ilustrasi tertentu untuk menekan gagasan tertentu. Sedangkan agar tujuan gagasan itu tampak wajar atau benar, teks berita itu didukung dengan perangkat penalaran (*reasoning device*), supaya gagasan yang tersaji tampak beralasan, tidak mengada-ada, benar, alamiah, dan memang demikian adanya. Ini misalnya dilakukan dalam teks berita dengan mengaitkan sebab-akibat, fakta satu sebagai dasar fakta lain, dan sebagainya. Intinya gagasan utama yang didukung oleh elemen dan perangkat wacana yang saling berkaitan satu sama lain, yang mendukung atau mengarah pada gagasan utama (Eriyanto, 2002:266). Selain teks dalam berita, yang menjadi elemen krusial dalam berita televisi adalah gambar. Televisi identik dengan gambar, tanpa gambar maka tidak ada berita. Oleh karena itu, gambar sangat krusial. Berdasarkan gambar, jurnalis televisi menuliskan berita.

Dengan demikian, pembahasan tentang berita televisi utamanya menyangkut pelaporan konstruksi realitas yang diperdengarkan melalui suara dan diperlihatkan melalui gambar. Begitu pentingnya unsur gambar, sehingga ia berpengaruh pada panjang dan pendeknya pelaporan atas suatu realitas. Kekuatan gambar menjadi nilai berita dan terkait dengan bentuk dan penyikapan. Gambar

mengautentikkan suatu item berita ditinjau dari segi kehadiran tempat dan reporter kepada peristiwa dan menjadikannya nyata (Halim, 2013)

Tabel 1.1 Perangkat *Framing* Media Model Gamson dan Modigliani

<p><i>Frame</i> Organisasi gagasan sentral atau alur cerita yang mengarahkan makna peristiwa yang dihubungkan dengan suatu isu.</p>	
<p><i>Framing Device</i> (perangkat Framing)</p>	<p><i>Reasoning Device</i> (Perangkat Penalaran)</p>
<p><u>Methapors</u> Perumpamaan atau pengandaian</p>	<p><u>Roots</u> Analisis kausal atau sebab akibat</p>
<p><u>Catchphrases</u> Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Ini umumnya berupa jargon atau slogan.</p>	<p><u>Appeals to Principle</u> Premis dasar, klaim klaim moral</p>
<p><u>Exemplar</u> Mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (bisa berupa teori, perbandingan) yang memperjelas bingkai</p>	<p><u>Consequences</u> Efek atau konsekuensi yang didapat dari Bingkai</p>
<p><u>Depiction</u> Penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. Depiction ini umumnya berupa kosakata, leksikon untuk melabeli sesuatu. <u>Visual Image</u> Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa foto, kartun, ataupun grafik untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan.</p>	

Sumber: Eriyanto. "Analisis *Framing*: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media". 2002:255

Frame (gagasan sentral) pada dasarnya berisi elemen-elemen inti untuk memberikan pengertian yang relevan terhadap peristiwa. Selain itu, *frame* juga mengarahkan makna isu-isu yang dibangun *framing devices* dan *reasoning devices*. *Framing devices* mencakup lima hal: *methapors*, *catchprases*, *exemplar*, *depiction*, dan *visual image*. Kelimanya menekan aspek bagaimana ‘melihat’ gagasan utama yang ingin ditampilkan. *Framing devices* digunakan agar bingkai suatu teks nampak meyakinkan. Pertama, *methapors* dipahami sebagai cara memindah makna dengan merelasikan dua fakta melalui analogi, atau kiasan dengan menggunakan kata-kata seperti, ibarat, bak, sebagai, umpama, laksana.

Kedua, *catchphrases* dapat berupa frase yang menarik, kontras, menonjol, dalam suatu wacana yang merujuk pada pemikiran tertentu. Dalam teks berita, *catchphrases* muncul dalam bentuk jargon, slogan, atau semboyan. Selanjutnya *exemplar* adalah mengaitkan bingkaidengan contoh, uraian, (bisa teori perbandingan) yang memperjelas bingkai.

Ketiga, *exemplaar* adalah cara mengemas atau menguraikan sebuah fakta tertentu secara mendalam, supaya memiliki makna yang lebih untuk dijadikan rujukan. Dalam *exemplaar* posisinya sebagai pelengkap dalam kesatuan wacana atau bingkai pada sebuah teks atau dialoh mengenai isu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh pembenaran isu sosial yang diangkat, bisa berupa contoh, uraian, teori, dan perbandingan yang bisa memperjelas bingkai.

Keempat, *depiction* adalah penggambaran fakta dengan memaknai kata, istilah, atau kalimat konotatif agar khalayak terarah pada citra tertentu.

Asumsinya, pemakaian kata khusus diniatkan untuk membangkitkan prasangka serta menyesatkan pikiran. *Depictions* dapat berbentuk stigmatisasi, eufimisme, serta akronimasasi.

Terakhir, *visual image* berupa gambar grafik, diagram, tabel, dan kartun dan sejenisnya juga citra yang digunakan untuk mengekspresikan kesan menekan pesan yang ingin disampaikan. Menurut Stuart Allan, visual lebih berdaya memindah realitas dalam wacana dibanding teks. Misalnya perhatian, penegasan, atau penolakan, terhadap isu tertentu. Sifatnya natural, sangat mewakili realitas atau isu tertentu erat dengan ideologi pesan terhadap khalayak (Sobur, 2002).

a. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah data audio visual (video) berita televisi dalam program-program tayangan yang terdapat di media Metro TV dan TV One selama bulan September 2014.

Tabel 1.2

Obyek Penelitian

Metro TV	TV One
Metro Highlight “Pro Kontra Pilkada Tak Langsung” edisi 12 September 2014	Apa Kabar Indonesia Malam “Pilkada Langsung atau Lewat DPRD, Liberal vs Pancasila” edisi 11 September 2014

Metro Siang “Pilihan Rakyat vs Wakil Rakyat” edisi 11 September 2014	Breaking News “Pilkada Langsung atau Tidak” September 2014
Metro Sore “Polemik Pilkada Langsung” September 2014	Kabar Siang “Pejabat Daerah Unggulan Pilkada Langsung” 12 September 2014
Metro Kini “Pro Kontra Pilkada tak Langsung” edisi 10 September 2014	Apa Kabar Indonesia Pagi “Pilkada langsung atau dipilih DPRD” September 2014

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada serta catatan-catatan yang berhubungan dengan analisis. Data yang diperoleh dari metode tersebut dapat diklasifikasikan dalam 2 jenis yaitu:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sendiri diperoleh dari kumpulan tayangan Metro TV dan TV One mengenai kasus Pilkada Tidak Langsung, selama periode September 2014.

b. Data Sekunder

Selain data-data primer, peneliti dalam penelitian ini juga memerlukan data sekunder. Data- data sekunder digunakan untuk mendukung atau menunjang data-data primer. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data sekunder dan berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian, antara lain mengumpulkan data-data yang terdapat pada website, buku literatur, jurnal, makalah dan surat kabar serta laporan penelitian dokumen-dokumen.

c. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai dengan penulisan skripsi ini analisis data pada penelitian ini menggunakan konsep *framing* yang menekan pada penonjolan kerangka pemikiran, perspektif, dan konsep memaknai tentang pemberitaan pilkada tidak langsung di media Metro TV dan TV One. Dalam hal ini, analisis *framing* bisa dirasa mampu untuk mencari tahu bagaimana kedua media tersebut melakukan proses pemingkakan polemik kasus pilkada tidak langsung. Pasalnya, analisis *framing* merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan dalam melakukan seleksi isu dan menuliskan berita.

Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, maka seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa penelitian ini menggunakan analisis *framing* dengan model Gamson dan Modigliani. Untuk itu, ada dua struktur atau level

yang perlu dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis, antara lain:

a. Level teks

Pertama akan dilakukan analisis pada level teks, yaitu menganalisa *transkrip* yang ada pada video berita pada media Metro TV dan TVOne terkait dengan pilkada tidak langsung. Tujuan dari analisis teks ini adalah untuk mengetahui bagaimana konstruksi yang dibangun pada berita tentang pilkada tidak langsung di kedua media tersebut.

Dalam menganalisis sebuah teks, hal pertama yang akan dilakukan adalah menganalisis *transkrip*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti salinan. Kegiatan yang mengubah data dari bentuk audio atau video ke dalam bentuk tulisan. Hasil transkrip berupa berupa teks atau tulisan rekaman audio atau video. Disajikan apa adanya, baik bentuk lisan maupun kondisi yang sedang berlangsung.

Hal yang perlu diperhatikan dalam model ini adalah penonjolan yang dibentuk untuk membuat sebuah berita. Nantinya, penonjolan ini akan membentuk sebuah *frame* pemberitaan berdasarkan pemilihan fakta dan narasumber yang dilakukan penulis dalam membuat teks berita.

b. Level visual

Pada level visual, analisis pengumpulan data adalah dengan cara menganalisa gambar yang ada pada video berita di Metro TV dan TV One. Hal ini

dilakukan guna mengetahui ideologi yang dibangun oleh kedua media tersebut melalui cuplikan gambar yang ditampilkan.

d. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi mejadi 4 bab, dan masing-masing bab memiliki pembahasan yang berbeda. Pada bab 1 peneliti akan menjelaskan latar belakang masalah serta rumusan masalah tentang pemberitaan pemilihan kepada daerah (pilkada) tidak langsung di TV One dan Metro TV. Kemudian peneliti juga akan memaparkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori serta metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Dalam bab 2 akan dibahas sejarah media televisi serta profil ringkas obyek penelitian yaitu TV One dan Metro TV, yang masing-masing berisi visi-misi dari kedua media televisi tersebut. Selain itu pada bab 2 ini juga akan dijelaskan mengenai Konglomerasi Media di Indonesia yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.

Pada bab 3, peneliti akan menjelaskan bagaimana hasil penelitian dan analisis dari data-data yang telah diperoleh, serta membandingkan perbedaan yang muncul dari analisis data. Akan disinggung sedikit pula mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi media TV One dan Metro TV di dalam mengkonstruksi pemberitaannya mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung.

Pada bab penutup yaitu bab 4, peneliti akan menyajikan kesimpulan dari hasil skripsi yang telah dibuat, kemudian peneliti akan memberikan saran sebagai penilaian atas penelitian yang telah dilakukan.